












**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEP.
BANGKA BELITUNG**

	NOMOR SOP	: W.7-OT.01.02-568
	TGL. PEMBUATAN	: 2 Januari 2020
	TGL. REVISI	: -
	TGL. EFEKTIF	: 2 Januari 2020
	DISAHKAN OLEH	:  Kepala Kantor Wilayah Drs. Agus Jaeful Anwar, Bc. IP., M.Si NIP. 16202191986031002
	NAMA SOP	: CERAMAH PENYULUHAN HUKUM TERPADU
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan mengolah data2. Mengetahui metode pengumpulan data dan informasi3. Mengetahui mekanisme pembuatan laporan	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none">1. Pembentukan /Pembinaan Desa/Kelurahan2. Peresmian Desa/Kel Sadar Hukum3. Lomba Kadarkum Tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Kepala BPHN Nomor PHN.HN.03.05-73 tentang pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum dan desa/kelurahan sadar hukum2. Peraturan perundang-undangan sebagai bahan materi ceramah2. Program Kerja3. TOR4. Komputer/Printer/Scanner5. Jaringan Internet	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Jika tidak dilaksanakan sosialisasi melalui ceramah penyuluhan hukum terpadu, masyarakat tidakpaham peraturan perundang-undangan yang berlaku	Di simpan sebagai data elektronik dan manual	

Flowchart SOP Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		Kadiv Yankum	Kabid Hukum	Kasubbid Luhkum Bankum dan JDIH	Fung. Umum	Inst/LSM/Ormas/Sek/Univ/Mas	Perengkapan	Waktu	Output	
1	Surat permohonan ceramah masuk dari instansi/LSM/Ormas/sekolah univ/masy							2 hari kerja	Surat Permohonan ceramah dari Inst/LSM/ormas/sekolah/univ/masy	
2	Hasil pengamatan Divisi Yankum tentang diperlukannya penyuluhan hukum di wilayah/tempat tertentu							5 hari kerja	Rekomendasi Atasan	
3	Surat Penolakan Permohonan Ceramah setelah mendapat disposisi dari Kadiv Yankum							2 hari kerja	Surat Penolakan permohonan ceramah	
4	Persetujuan permohonan ceramah setelah mendapat disposisi dari Kadiv Yankum							2 hari kerja	Disposisi Kadiv Yankum untuk ditindaklanjuti	
5	Pembahasan untuk persetujuan pelaksanaan Ceramah PH dan melakukan persiapan anggaran, tempat, materi, penceramah dan moderator						Anggaran, tempat, materi, penceramah dan moderator, ATK	10 hari kerja	Acc Kadiv Yankum	
6	Memberikan surat tugas penetapan personil							2 hari	Surat Tugas	
7	Pelaksanaan Kegiatan							1 hari	Tersosialisasikan peraturan uu ke masyarakat	
8	Membuat Laporan Kegiatan							5 hari	Laporan Kegiatan Akhir untuk rekomendasi ke berikutnya	
9	Selesai				